

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sistem yang dilakukan dengan menginput data atau informasi dan output berupa informasi yaitu laporan keuangan yang memiliki manfaat bagi pengguna internal maupun eksternal suatu entitas (Sofyan, 2013:59) *Accounting is the process of classification, counting, and giving the economic information to approve the information judgement and decision by users who are interested with it* (American Accounting Assosiation/AAA). *Accounting is the art of bookkeeping, recognizing, concluding in brief and intern cases includes money, transaction, assets, liabilities, ekuities, and etc* (American Institute of Certified Public Accountants/AICPA).

“Akuntansi merupakan prosedur informasi yang berulang menghasilkan output berupa laporan keuangan yang berisi mengenai rincian situasi dan kondisi ekonomi dalam perusahaan bermanfaat untuk para pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut” (Warren,dkk, 2014:3). Selain itu, “akuntansi adalah kegiatan mengonfrontasikan, menelaah, menyediakan dalam bentuk angka, mengkategorisasikan, menulis, merangkum, dan memberitahukan kegiatan ekonomi suatu entitas kedalam suatu output berupa laporan keuangan suatu entitas dimana berisi mengenai informasi keuangan suatu entitas” (Rudianto, 2012:4).

Berdasarkan penjelasan diatas singkatnya jika akuntansi terdiri dari 3 kegiatan dasar yaitu pengenalan, penulisan dan penyampaian informasi atas kondisi ekonomi suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi tersebut. Suatu entitas mengidentifikasi kondisi ekonominya sesuai dengan kegiatan usaha dan mencatat kegiatan ekonomi tersebut untuk menyediakan pencatatan kegiatan yang berkaitan dengan kondisi keuangan entitas. Pencatatan dilakukan secara sistematis, kronologis, dengan satuan mata uang yang telah ditetapkan pada kebijakan akuntansinya. Kemudian, pada tahap pengkomunikasian informasi keuangan mengenai suatu entitas disajikan dalam laporan akuntansi yang disebut dengan laporan keuangan pada suatu entitas.

2.2. Good Government Governance

Good Government Governance ialah yang menyelenggarakan pemerintah yang dimana pemerintah itu solid atau saling berhubungan dengan baik mempunyai tanggungjawab, serta harus efisien dan efektif dalam menjalankan tugas atau proses pengelolaan dalam pemerintahan (Tamrin dkk, 2017).

Dalam peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 yang dimana merumuskan atau mengartikan *Good Government Governance* adalah suatu pemerintahan yang dimana akan menerapkan, mengemban atau menjunjung suatu prinsip yang akan digunakan dan dijalankan untuk menciptakan pemerintah yang baik yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisien efektifitas, supermasi, hukum dan diaman pemerintah itu dapat diterima oleh masyarakat.

Good Government Governance diman dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam pemerintahan yang dilaksanakan dengan proses yang telah diatur atau ditetapkan suai dengan kebijakan atau terapturan yang sudah berlaku dalam pemerintahan itu (Dzaky dkk, 2020).

Tata kelola pemerintahan yang baik atau dapat disebut juga *Good Government Governance* ialah suatu atau sebuah kesepakatan yang sudah ditentukan dan akan dilaksanakan yang memiliki keterkaitan dengan peraturan negara yang hal ini diciptakan dan diputuskan secara bersama atau musyawara bersama dengan pemerintah, masyarakat umum, swasta dan hal yang akan memiliki keterkaitan dengan pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan pemerintah didalamnya (Tullah et al., 2018).

Menurut (Mardiasmo, 2009) yang menjelaskan atau mengartikan *Good Government Governance* ialah sebuah konsep yang dimana hal ini memiliki endekatan yang berotoritas terhadap suatu pembangunan dalam sector public untuk dilaksanakannya pemerintahan yang baik.

Untuk menciptakan tata kelola yang baik butuh suatu yang dibangun didalamnya yaitu komunikasi antara para pelaku yang memiliki kepentingan dalam negara, dengan hal ini makan pemerintahan akan berjalan sesuai dengan sasaran dan rancangan yang dimana sejak awal ditetapkan dan jika hal itu sudah dilaksanakan mana hasil yang akan diperoleh maka memiliki suatu kaulitas yang

baik dan memiliki potensi dan perkembangan yang baik bagi daerah atau pun negara itu.

2.3. Akuntabilitas

2.3.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dapat kita artikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimana menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas adalah suatu bentuk dari pertanggungjawaban entitas atas pengelolaan dan pelaksanaan dalam menjalankan kebijakan serta sumber daya yang dimana telah ditetapkan dan sudah dipercayakan kepada suatu entitas yang sebagai pelapor dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan *Good Governance*.

Menurut (Abdul Halim, 2012:20) yang mendefinisikan akuntabilitas yaitu sebagai kewajiban yang dimana kan memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan suatu tindakan dan kinerja seseorang. Dalam suatu badan hukum ataupun pimpinan dalam organisasi kepada pihak yang lain dimana pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam meminta bentuk pertanggungjawaban kewajiban tersebut.

Menurut (Maradiasmo, 2009:20) Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban atas pertanggungjawaban dari keberhasilan ataupun kegagalan yang dimana selama pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dalam organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dimana telah ditetapkan oleh pemerintah atau entitas tersebut, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dari keberhasilan dan kegagalan yang dimana dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan suatu instansi yang bersangkutan. Dalam asas akuntabilitas yang dimana ditetapkan bahwa setiap proses kegiatan negara bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang dimana sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara demokrasi (Jitmau, dkk, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang SAP dimana akuntabilitas memiliki kuasa untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengelolaan sumber daya publik dan juga dalam penerapan teknis kebijakan yang dimana sudah diamanahkan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan dan rancangan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pada dasarnya laporan keuangan dalam instansi pemerintah merupakan suatu asersi dari pihak manajemen pemerintah yang diaman memberikan informasi guna sebagai pengambilan keputusan dan mewujudkan akuntabilitas suatu entitas pelapor atas sumber daya yang telah dipercayakan, jadi akuntabilitas memiliki asa yaitu menetapkan bahwa suatu kegiatan yang terjadi dipemerintahan dan hasil akhir yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

yang diaman sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan negara demokrasi (Rasinta, 2017).

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang bertujuan di mana dapat memberikan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena sumber dana yang dilakukan setiap kegiatan pemerintah itu dari masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas akuntabilitas merupakan media untuk mempertanggungjawabkan dalam menyajikan dan menyampaikan setiap laporan kegiatan publik di dalam instansi pemerintah.

2.3.2. Sifat Akuntabilitas

Dalam laporan keuangan pemerintah harus memberikan informasi yang bisa dipergunakan oleh pengguna laporan keuangan yang dimana digunakan untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai penghubung antara pihak yang memegang kendali dan mengatur dalam pemerintah dengan pihak yang memiliki kekuasaan formal atas pemegang kendali tersebut (Meriansa, 2017).

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai suatu tingkatan dalam lima tahap yang berbeda, yang diaman dari tahap yang membutuhkan ukuran-ukuran obyektif ke tahap yang membutuhkan banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap yang dimaksud adalah (J.D Stewart dalam Nico Andrianto, 2007:23-24):

1. *Probity and legality accountability* pada bagian ini merupakan hal yang menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang sudah dirancang dan disetujui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).
2. *Process accountability* pada bagian ini merupakan hal yang menggunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan (*planning, allocating, and managing*).
3. *Performance accountability* dalam bagian ini dapat dilihat apakah kegiatan pelaksanaan yang sudah dilakukan berjalan dengan efisien (*efficient and economy*).
4. *Program accountability* dalam hal ini dimana akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan (*outcomes and effectiveness*).
5. *Policy accountability* pada tahap ini dapat dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan atau tidak selama proses pelaksanaan kegiatan (*value*).

Akuntabilitas pemerintah yang dimana negara tersebut menganut pemahaman demokrasi yang sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar dalam

demokrasi yang dimana adalah kedaulatan yang ada ditangan rakyat. Pemerintahan indonesia adalah pemerintahan demokrasi yang menjalankan dan mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara dengan membuat sejumlah peraturan serta mengambil dan menggunakan semua sumber dana pada masyarakat untuk menjalankan proses pemerintahan. Maka dari itu pemerintah wajib mempertanggungjawabkan atas semua kegiatan kepada masyarakat.

2.3.3. Ciri-Ciri Pemerintahan yang Akuntabel

Akuntabilitas berperan sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang dimana menentukan kebenaran satu tindakan dalam birokrasi. Pada pengendalian dari luar akan menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat pemerintah untuk bekerja lebih keras, karena akan ada penilaian dari luar. Masyarakat berperan sebagai penilai objektif secara menyeluruh yang dimana akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi tersebut.

Ada beberapa ciri-ciri pemerintahan yang bisa disebut *accountable* yaitu menurut (Finner dalam buku Joko Widodo, 2010:104):

1. Bersedia dan mampu menyajikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, tepat, kepada masyarakat.
2. Bersedia dan mampu memberikan pelayanan yang baik untuk publik.
3. Bersedia dan mampu menjelaskan dan juga mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara profesional.
4. Bersedia dan mampu memberikan ruang untuk masyarakat dalam keterlibatannya proses pembangunan pemerintahan.
5. Tersedianya sasaran untuk publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat bisa menilai derajat dalam pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah.

2.3.4. Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas maka diperkukannya prinsip-prinsip dasar akuntabilitas yang dapat dilihat sebagai berikut (Budiardjo, 2007:81):

1. Komitmen yang memiliki sifat dependen dari atasan dan staf.
2. Terstrukturnya penggunaan sumberdaya publik dengan konsisten yang didukung dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
3. Memiliki tingkat pencapaian atas tujuan dan sasaran.

4. Berfokus kepada pencapaian dari visi, misi dan hasil serta manfaat yang akan didapatkan.
5. Bersifat jujur, obyektif, dan inovatif dalam penyusunan laporan akuntabilitas.

2.3.5. Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas mempunyai manfaat dalam strategi yang disusun untuk bisa menganalisis akan terjadinya perikau penyimpangan. Akuntabilitas dianggap mampu memberikan peranan dalam bentuk kontribusi usaha yang dimanakan maksudnya dapat memitigasi praktek korupsi di kalangan elit politik serta ruang lingkup instansi pemerintahan.

Akuntabilitas mempunyai hal penting sebagai suatu uapa dalam pengimplementasikan sistem akuntabilitas pada instansi pemerintah (Albugis, 2016) :

1. Membangun tingkat kepercayaan masyarakat dan responsivitas instansi pemerintah.
2. Meningkatkan tingkat transparansi dan responsivitas instansi pemerintah.
3. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Mendorong instansi pemerintah unruk bekerja dengan efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi dari masyarakat.
5. Mendorong berkembangnya sistem penilaian yang wajar dengan mengembangkan pengakuan kinerja.
6. Mendorong terciptanya kinerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.3.6. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki akuntabilitas yang dimana harus dipenuhi oleh lembaga publik, dimensi tersebut antara lain (Mahmudi, 2016:19):

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Dalam hal ini akuntabilitas merupakan lembaga-lembaga publik untuk dapat berperilaku jujur dalam melakukan proses pelaksanaan dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum harus berkaitan dengan kepatuhan suatu instansi terhadap hukum dan peraturan yang sudah mengikat mereka selama proses pelaksanaan kegiatan pemerintah dan akuntabilitas kejujuran yaitu memiliki kaitan dengan sifat penyalahgunaan jabatan yang dipengang oleh

pemegang kekuasaan di pemerintahan agar tidak terjadinya kecurangan selama proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

2. Akuntabilitas Proses

Dalam proses pelaksanaan kebijakan akuntabilitas yang memiliki kaitan dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sudah memiliki kecukupan dalam hal sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas proses yang berkaitan dengan suatu pertimbangan diana kita melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan bisa dicapai atau tidak, dan juga apakah organisasi tersebut dapat mempertimbangkan cara program yang akan memrikan hasil yang lebih optimal dengan biaya yang sedikt. Instansi publik hrus dapat mempertanggungjawabkan semua program yang telah dibuat dalam setiap pelaksanaannya. Jadi akuntabilitas program dapat diartikan bahwa program yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah hendaknya program yang mendukung strategi untuk mencapai sebuah visi, misi dan tujuan organisasi yang telah dirancang dari awal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Pada bagian ini akuntabilitas kebijakan merupakan hal yang memiliki kaitan dengan pertanggungjwaban suatu instansi kepada masyarakat atas kebijakan yang diambil oleh instansi pemerintah. Dalam mengambil dan memutuskan sebuah kebijakan yang akan di putuskan untuk dijalan kan kepada proses pelaksanaan kegiatan pemerintah harus mempertimbangkan apakah kebijakan yang diambil melalui pertimbangan untuk masa depan, kebijakan tersebut apatujuannya,siapa sasaranya, mengapa kebijakan itu diambil, bagian mana yang akn berpengaruh ketika kebijakan itu diambil dan siapa yang akan memperoleh manfaat dan dampak negatif dari kebijakan itu.

2.4. Transparasi

2.4.1. Pengertian Transparasi

Transparasi disusun atas dasar dari arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahn, lembaga-lembaga dan instansi informasi harus dapat diakses

oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut dan informasi yang harus tersedia dapat memadai agar bias dimengerti dan dipantau. Ada beberapa pengertian dari transparansi antara lain:

Transparansi adalah wadah pemberian informasi yang jujur dan transparan terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan dari masyarakat yang memiliki hak untuk dapat mengetahui secara terbuka dan keseluruhan atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimana sudah dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatan pemerintah dalam melaksanakan amanah tersebut terhadap peraturan perundang-undangan (SAP No. 71 2010).

Transparansi juga merupakan prosedur atau tata cara pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan dan hal-hal yang memiliki kaitannya dengan proses pelayanan umum yang wajib diinformasikan secara transparan agar dapat mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh masyarakat (Septiningtyas, 2018).

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Government Governance* yang berkaitan dengan aspek kebebasan untuk memperoleh informasi keuangan yang memiliki hubungan dengan kepentingan publik, dimana publik dapat memperoleh informasi tersebut dengan mudah (Salle, 2016).

Transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan ataupun dalam mengungkapkan informasi yang bersifat material dan yang relevan terhadap perusahaan (Simanjorang, 2018). Selain itu menurut (Mahmudi, 2015:17) transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam menyediakan informasi yang memiliki kaitannya dengan kegiatan dalam mengelola sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memiliki atau memangku kepentingan.

2.4.2. Manfaat Transparansi

Transparansi memiliki urgensi yang penting di dalam instansi pemerintahan yaitu sebagai berikut (Salle, 2016):

1. Mempelajari, mengontrol, dan mengawasi kinerja instansi pemerintah.
2. Alat untuk memitigasi ketidakpastian ketetapan instansi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

3. Mendorong dan meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan yang diberitahukan kepada publik.
4. Memitigasi probabilitas terjadinya fraud seperti korupsi dan lainnya diruang lingkup pemerintah.

2.4.3. Indikator Transparansi

Indikator dalam Transparansi yang dijelaskan dalam (Nengsih, dkk, 2019):

1. Mengukur suatu tingkat keterbukaan dalam proses pelaksanaan dalam pelayanan publik.
2. Melihat seberapa mudah dalam peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan dimana peraturan dan prosedur tersebut dapat dipahami oleh para pengguna informasi dan *stakeholder* lainnya.
3. Memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan aspek penyelenggaraan dalam pelayanan publik.

2.4.4. Dimensi Transparansi

Terdapat beberapa dimensi dari transparansi (Mardiasmo, 2009:19) adalah sebagai berikut:

1. *Invormativeness* (informatif), yaitu pemberian fasilitas dalam mengakses informasi keuangan, kepada pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut.
 - a. Tepat waktu.
 - b. Memadai.
 - c. Jelas.
 - d. Akurat.
 - e. Dapat diperbandingkan.
 - f. Mudah diakses.
2. *Openness* (Keterbukaan), yaitu keterbukaan dalam mengakses informasi publik atas pemberian hak kepada pihak berkepentingan untuk dapat memperoleh informasi tersebut.
3. *Disclosure* (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada public (stakeholders) atas program, kegiatan dan kinerja finansial.
 - a. Kondisi Keuangan.
 - b. Susunan pengurus.
 - c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.

2.5. Responsibilitas

2.5.1 Pengertian Responsibilitas

Responsibilitas adalah kemampuan sebuah organisasi yang dimana bertugas untuk mengatur bagaimana cara entitas memberikan pelayanan yang telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku atau prosedur yang telah ada. Responsibilitas merupakan kebijakan yang mengukur tingkat suatu partisipasi dalam memberikan layanan selama proses pelaksanaan

tugasnya. Responsibilitas dapat diartikan juga sebagai suatu ukuran yang akan menunjukkan sejauhmana entitas melaksanakan proses dalam memberikan pelayanan bagi publik yang akan dilakukan sesuai dengan prinsip dan aturan yang telah berlaku untuk pelaksanaannya.(Muslimah, 2016).

Menurut Fredrick responsibilitas merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan standar professional yang dimiliki seorang administrator public untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. (Muslimah, 2016).

Responsibilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.dalam pengertian responsibilitas yang dijelaskan menurut kamus administrasi diaman responsibilitas merupakan keharusan seorang yang melaksanakan kewajibannya sudah benar dengan dijalankan secara layak seusai dengan peraturannya yang telah diberikan tanggungjawab terhadap tugas tersebut. Bukan hanya itu responsibilitas juga mengandung makna bahwasannya seseorang harus memiliki kebebasan dalam melakukan suatu tugas yang diberikan untuknya, tetapi mereka juga tidak dapat menyalah gunakan kebebasan itu dari hasil maupun akbita yang dilakukannya. Jika mereka melakukan suatu tindakan kecurangan maka dia dapat dituntut secara hukum yang berlaku (Aprili H, 2020).

Penjelasan dari (Azheri, 2012:86) responsibilitas yaitu suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan dari kewajiban dan keputusan, keahlian, kemampuan serta keterampilan. Dalam mempertanggungjawabkan kewajiban termasuk dalam undang-undang yang telah dilaksanakan dan dimemperbaharui ataupun dengan kata lain memberikan ganti rugi atas sebuah kelalayan apapun yang ditimbulkan

Penjelasan dari (Azheri, 2012:86) juga menjelaskan bahwa tanggungjawab adalah “responsibility having the character of a free moral agent; capable of determining one’s act; capable deterred by consideration of sanction or consequencess.” Penjelasan diatas dapat diambil dua kesimpulan yaitu: pertama seseorang harus memiliki rasa keberanian dan tanggung jawab dalam menetapkan suatu perbuatan yang kedua dimana seseorang harus memiliki keberanian dan tanggungjawab untuk dapat menerima resiko apapun dari suatu perbuatan selama proses pelaksanaan. Dimana dalam kata tebal *Having The Character* yang

terkandung didalam pengertian itu menjelaskan bahwa adanya tuntutan yang berupa kewajiban dan keharusan seseorang yang didalamnya akan mengandung makna pertanggung jawaban oral ataupun karakter, dimana karakter yang dimaksud yaitu berupa cerminan nilai dari perbuatan. Dalam setiap perbuatan akan ada alternative penilaian yaitu tahu tanggungjawab atau tidaknya seseorang tersebut.

Dari penjelasan dan beberapa pengertian menurut para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggungjawab merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam menyelenggarakan, melaksanakan setiap kewajiban yang telah diberikan dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kewajiban diharapkan pemerintah melakukannya dengan sebaik-baiknya tidak sekedar melaksanakannya asal-asalan baik dalam pengawasan atau tidaknya pemerintah harus tetap memberikan yang terbaik secara efektif dan efisien.

2.5.2 Jenis Tanggungjawab

Ada dua jenis tanggungjawab yang sering ditemukan yaitu tanggungjawab subjektif dan yang kedua yaitu tanggungjawab obyektif yang dimana tanggungjawab obyektif harus dilakukan dengan dan dituntut dari luar diri kita sedangkan tanggungjawab subjektif merupakan hal yang berfokus pada suatu peristiwa yang membuat seseorang merasa memiliki tanggungjawab kepada kewajibannya (Muslimah, 2016). Terdapat 2 jenis tanggungjawab yaitu:

1. Objective Responsibility

Tanggungjawab obyektif memiliki 2 dimensi spesifik yaitu kewajiban dan akuntabilitas. Semua hal yang berhubungan dengan tanggungjawab obyektif yang dimana memiliki ikatan dengan pertanggungjawaban kepada seseorang ataupun badan kolektif dan juga bertanggungjawab kepada tugas-tugas yang bersifat tertentu bawahan dan hal yang berhubungan dengan pencapaian untuk tujuan (Muslimah, 2016).

Kewajiban merupakan hal kepentingan umum yang paling mendasar dan akuntabilitas merupakan cara untuk dapat memastikan bahwa dapat terpenuhi kewajibannya dalam tingkatan pada struktur. Akuntabilitas dapat diartikan berupa hubungan staf dan pimpinan dan juga kewenangan antara pimpinan dan staf dalam mengatur semua kerjasama untuk dapat mencapai

2. Subjective Responsibility

Dilihat dari semua kewajiban diluar dari itu semua hal ini yang merupakan salah satu dari dimensi tanggungjawab. Dengan adanya tanggungjawab subjektif

yang berkaitan dengan perasaan pada diri dan juga keyakinan yang berhubungan tentang tanggungjawab dari itu. Jika tanggungjawab obyektif yang muncul dari tuntutan hukum, masyarakat maupun organisasi tetapi pada tanggungjawab subjektif merupakan hal yang muncul dari keyakinan diri sendiri tentang dasar kesetiaan, hati nurani, dan indentifikasi.

Tanggungjawab subjektif merupakan hal yang mengikat tentang tingkatan kesetiaan, nilai-nilai, dan karakteristik. Pada dasarnya tanggungjawab subjektif adalah keyakinan pada dirisendiri untuk menaati aturan yang berlaku, kesetiaan terhadap instansi dan juga bertanggung jawab dalam melaksanakan semua kewajiban. Hal tersebut harus mendasar pada diri, agar tidak ada timbul rasa untuk melakukan kecurangan kepada instansi, lembaga ataupun organisasi yang dimana kita harus menjalankan kewajiban tugas kita.

2.5.3 Indikator Tanggjawab

Adapun indikator tanggungjawab yang dipakai dalam penelitian ini meliputi (Muslimah, 2016) :

1. Kejelasan tanggungjawab dan wewenang.
2. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang.
3. Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia).
4. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.
5. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana.
6. Memiliki kebijakan mengenai metode kerja

2.6. Independensi

2.6.1. Pengertian Independensi

Independensi merupakan karakter yang bebas dari sebuah pengaruh, tidak dapat dikendalikan, tidak bergantung kepada pihak manapun. Independensi juga dapat diartikan sebuah kejujuran dari dalam diri untuk dapat mempertimbangkan sebuah keputusan dan tidak memihak kepada siapapun. Sikap mental yang harus dimiliki yaitu *Independence in fact* dan *independence in appearance* (Shintya, dkk, 2016).

Definisi independensi menurut Standar Profesional Akuntan Publik yaitu akuntan public tidak dapat dipengaruhi, tidak berpihak, berkewajiban untuk jujur dalam mengambil keputusan. Dapat dilihat dari kata independen yang memiliki arti tidak mudah dipengaruhi atau bisa disebut netral karena independen itu merupakan orang yang akan melaksanakan tugasnya untuk kepentingan umum seperti auditor.

Maka dalam laporan keuangan setiap staf pemerintah harus memiliki sikap mental yang bersifat independen agar selama proses penyusunan laporan keuangan para staf tidak berada dibawah tekanan.

2.6.2. Jenis-jenis Independensi

Menurut (Arens,dkk, 2011:74) independensi terdapat dua unsur, yaitu:

1. Independensi dari fakta

Independens fakta akan dapat dilihat ketika seorang auditor secara keseluruhan menjaga kualitas objektivinya selama melakukan audit.

2. Independensi dari penampilan

Independensi penampilan yaitu suatu interpretasi orang luar yang memiliki hubungan terhadap independen auditor tersebut.

Jadi dapat disimpulkan setiap staf pemerintahan harus memiliki sikap mental tersebut agar semua laporan yang akan disusun tidak terjadi kesalan dan ketika audit mengaudit laporan keuangan para OPD akan meminimalisir adanya kecurangan atau kesalahan. Maka laporan keuangan pemerintah memiliki kualitas yang baik

2.6.3. Dimensi Independensi

Menurut (Mautz dan Sharaf dalam Theodorus, 2011:64-65) menekankan tiga dimensi dari independensi sebagai berikut:

1. *Programming independence*

Programming independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik, prosedur audit, berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu ditetapkan.

2. *Investigative independence*

Investigative independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti tidak boleh ada sumber informasi yang legitimasi (sah) yang tertutup bagi auditor.

3. *Reporting independence*

Reporting independe adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan."

Berdasarkan ketiga dimensi independensi tersebut, Mautz dan Sharaf mengembangkan petunjuk yang mengindikasikan apakah ada pelanggaran atas independensi. (Mautz dan Sharaf dalam Theodorus, 2011:64-65) menyarankan:

1. *Programming Independence*

- a. Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (*eliminate*), menentukan (*specify*) atau mengubah (*modify*) apapun dalam audit.

- b. Bebas dari intervensi apapun dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
 - c. Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu direview diluar batas-batas kewajaran dalam proses audit.
- 2. Investigative Independence**
- a. Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, catatan, pimpinan pegawai perusahaan dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajiban dan sumber-sumbernya.
 - b. Kerjasama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit.
 - c. Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu evidential metter (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian).
 - d. Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan.
- 3. Reporting Independence**
- a. Bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seseorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan.
 - b. Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukkannya kedalam laporan informal dalam bentuk apapun.
 - c. Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun yang tidak didalam pernyataan fakta, opini dan rekomendasi dalam interpretasi.
 - d. Bebas dari upaya untuk memveto (*judgement*) auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini.”

Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh (Mautz dan Sharaf dalam Theodorus, 2011:64-65) sangat jelas dan masih relevan untuk auditor pada hari ini. Petunjuk-petunjuk tersebut menentukan Independen atau tidaknya independen seorang auditor.

2.7. Kualitas Laporan Keuangan

2.7.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil atau output dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. (Harahap, 2016:105) menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu suatu gambaran atau kondisi keuangan dan hasil satu usaha perusahaan pada saat tertentu atau dalam satu periode tertentu.

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia,2015:1) yang menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu stuktur yang dimana akan menyajikan posisi keuangan dan kinerja yang terjadi dalam suatu entitas. Dan memiliki tujuan umum dari laporan tersebut untuk kepentingan umum berupa informasi yang menjelaskan posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*) dan arus kas (*cash flow*) yang didapatkan dari suatu entitas yyang akan digunakan untuk membuat keputusan ekonomis bagipara pengguna informasi.

Laporan keuangan daerah adalah suatu hasil yang dilihat dari proses akuntansi daerah yang dimana terdapat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, yang dimana digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut (Ramadhan,2017)

Definisi laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Entitas pelaporan sendiri merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. LKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Merupakan salahsatu laporan yang disediakan oleh pemerintah yang sebelumnya tidak ada didalam daftar laporan keuangan pokok pemerintah menurut SAP berbasis kas menuju akrual. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih memfokuskan memberikan laporan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.7.2. Peranan Laporan Keuangan

LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP 71 Tahun 2010, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.7.3. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP 71 Tahun 2010 adalah untuk “menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya”, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan

ketidakpastian yang terkait. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

2.7.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif pada laporan keuangan yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 disebutkan yakni:

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*).
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*).
Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila :

- a. Dapat diuji kebenarannya (*verifiable*)
Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.
- b. Netral
Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.8. Penelitian Terdahulu

Dalam Melakukan penelitian pada Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang terdapat penelitian terdahulu sebagai landasan teori dan refrensi dalam menyusun dalm meneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hayyuni Tyas Rosdiani (2011)	Pengaruh sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan	Sistem Pengendalian Internal (X1), Audit laporan Keuangan (X2), Penerapan Good Corporate Governance (X3), Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persial dan secara silmutan sistem pengendalian internal audit laporan keuangan, dan penerapan <i>good corporate governance</i> (GCG) berpengaruh

		Keuangan		terhadap kualitas laporan keuangan
2.	Ade Rasinta (2017)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Akuntabilitas (X1), Transparasi (X2), Responsibilitas (X3), perlakuan setara(fairness) (X4), Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan penerapan ke-4 prinsip Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap karakteristik kualitas Laporan Keuangan yang dilihat dari nilai F-tabel sebesar 41,041 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas dan transparansi, sedangkan

				<p>responsibilitas dan perlakuan yang setara juga harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan walaupun tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan, melainkan memperngaruhi kualitas Sumber Daya Manusia.</p>
3.	Desmari a Puji Kesuma dkk (2017)	<p>Pengaruh <i>Good Governance</i>, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Good Governance (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3), Kompetensi Aparatur Pemerintah (X4), Kualitas Laporan Keuangan (Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan good governance secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh positif</p>

		Pemerintah pada Satuan Kerja Kementrian Pariwisata		signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan aparat pemerintah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Mulya Rafika (2018)	Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Kualitas laporan Keuangan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating Perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2014-2018	Kepemilikan (X1) Ukuran Perusahaan (X2) <i>Lverage</i> (X3) Kualitas Laporan Keuangan (Y) Profitabilitas (Z)	Variabel kepemilikan institusional (KI), ukuran perusahaan (SIZE), leverage (DAR) dan profitabilitas (ROA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial terbukti variabel kepemilikan institusional (KI) dan ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada perusahaan manufaktur terdaftar

				di Bursa Efek Indonesia untuk periode. Pengujian secara parsial variabel leverage (DAR) dan profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014-2018.
5	Tika Septinin gtyas (2015)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X3), Sistem Pengendalian Internal (X4), Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa hanya pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Sedangkan akuntabilitas, transparansi, dan

		Daerah Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal		sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal.
6	Mariska (2015)	Pengaruh penerapan Standar akuntansi pemerintahan dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Studi Empiris Skpd Kota Bandar Lampung	Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Good governance (X2), Kualitas Laporan Keuangan (Y1)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh antara good governance Terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah namun tidak dapat memberikan bukti bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7.	Fina Riyanti (2017)	Pengaruh Penerapan Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi	Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X3), Penerapan Sistem	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, transparansi tidak

		Pemerintah dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengendalian Intern (X4), Kualitas Laporan Keuangan (Y)	berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan satndart akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan penerapan sistema pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kaulias laporan keuangan pemerintah daerah.
8	David Wahyu H, Dkk (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Lpaoean Keuangan BPRS di Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Malang	Sistem Pengendalian Internal(X1) Good Corporate Governance (X2) Kualitas laporan Keuangn (Y)	Hasil penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akualitas laporan keuangan dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

9.	M.Hanif NR (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Dalian dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada PT.Bank Mandiri)	Sistem Pengendalian Intern (X1) <i>Good Corporate Governance</i> (X2) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem pengendalian intern terhadap kaulitas laporan keuangan memiliki pengeruh yang signifikan sebesar 15,2% dan pada variabel Good Corporate Governance memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 26,3% . sedangkan secara simultan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh sebesar 41,5% terdapat kuitas laporan keuangan dan 58,5% lainnya berasal dari factor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
----	-------------------------	--	--	--

Sumber: data yang diolah 2021

2.9. Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan yaitu suatu laporan yang dimana merupakan sumber informasi dan dapat dipergunakan oleh pihak eksternal untuk suatu kepentingan dengan entitas, lembaga maupun perusahaan (Rahman,dkk, 2019). Selama proses menyediakan informasi yang berbentuk laporan keuangan memiliki suatu tujuan yang dapat diperoleh dari laporan tersebut mengenai informasi staus dalam laporan keuangan, baik performa maupun perkembangan pada status keuangan entitas pelapor yang akan berguna bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan (Rahman,dkk, 2019).

Good governance merupakan suatu hal yang sangat sulit ditemukan di Negara Indonesia Banyaknya kasus korupsi di ruang lingkup pemerintahan yang diberitakan melalui media massa, operasi tangkap tangan beberapa oknum yang bekerja di pemerintahan beserta adanya beberapa kasus lainnya yang sedang dan masih berlangsung hingga saat ini di KPK serta lembaga pengadilan. Hal ini membuktikan jika adanya kelemahan di dalam *good government governance* atas pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

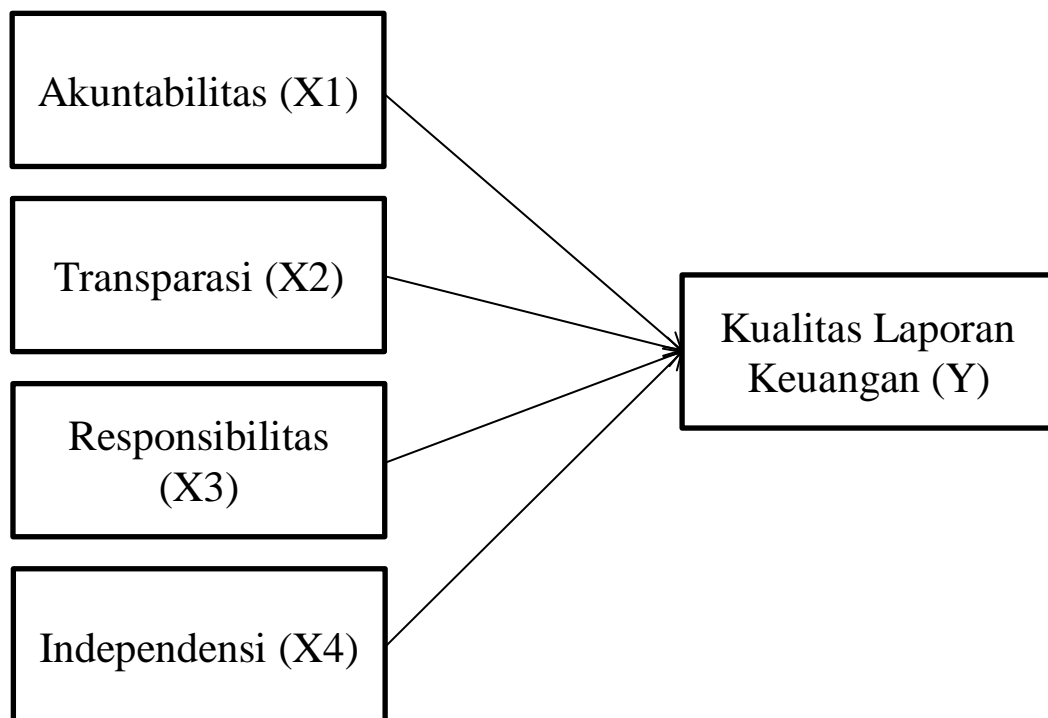
Good Government Governance adalah output dari keberhasilan suatu pemerintahan dalam menjalankan tugas mengelola negara dimana mempunyai hubungan keterkaitan dengan tujuan negara yang tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan negara. Adanya aspek ketidaktertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan laporan keuangan tidak memenuhi kedalam kriteria kualitas yang menunjukkan gagalnya *good governance*. Kualitas laporan keuangan dapat diraih ketika suatu instansi ataupun Negara mampu menyajikan laporan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas (Rasinta, 2017).

Bukan Hanya Transparansi dan akuntabilitas yang harus disajikan dalam mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas ada faktor pendukung lainnya yaitu Responsibilitas dan Independensi yang merupakan faktor yang memiliki pengaruh untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dari itu adanya penerapan *Good Government Governance* yang memiliki prinsip yang mencakup keseluruhan (Rasinta, 2017).

Penerapan *Good Government Governance* yang telah dilaksanakan pada keuangan publik di Indonesia dari itu perhatian masyarakat meningkat yang disebabkan oleh salah satu faktor yaitu desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pada pemerintah daerah (Rafika, 2018). Hal tersebut diwujudkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang melalui peningkatan pelayanan, keajahteraan dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat pada pemerintahan. Untuk dapat melihat kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut yaitu dengan cara pengaruhnya pada *Good Government Governance* laporan keuangan tersebut.

Dalam laporan keuangan *Corporate Governance* merupakan salah satu unsur yang ada didalamnya, laporan keuangan merupakan suatu rangkaian yang menjelaskan sebuah proses, kebijakan, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memiliki pengaruh untuk mempengaruhi oengarahan, pengelolaan dan juga mengontrol suatu instansi atau pun lembaga baik pemerintahan maupun organisasi (Rafika, 2018).

Penerapan kebijak *Good Government Governance* yang baik akan menghasilkan suatu kualitas laporan keuangan yang baik pula, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mempengaruhi gasil dari laporan keuangan karena sebuah instansi pemerintah maupun perusahaan yang menerapkan kebijakn tersebut akan sulit melakukan kesalahan ataupun kecurangan untuk memanipulasi akuntansi karena akan terjadi pengawasan yang ketat dari pimpinan maupun dari badan pengawasan dan auditor, sehinggal laporan keuangan yang akan dihasilkan akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berkualitas. (Rafika, 2018).



Sumber : *Data yang diolah 2021*

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.10. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari uraian pokok permasalahan, landasan teori, hasil kajian penelitian terdahulu maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

2.10.1 Pengaruh Penerapan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggung jawabkan suatu keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan kegiatan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang SAP dimana akuntabilitas memiliki kuasa untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan pengelolaan sumber daya publik dan juga dalam penerapan teknis kebijakan yang dimana sudah diamanahkan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan dan rancangan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas yang dapat kita artikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimana menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas adalah suatu bentuk dari pertanggungjawaban entitas atas pengelolaan dan pelaksanaan dalam menjalankan kebijakan serta sumber daya yang dimana telah ditetapkan dan sudah dipercayakan kepada suatu entitas yang sebagai pelapor dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan *Good Government Governance*.

Dari pengertian teori diatas dapat ditarik esimpulannya bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh yang penting terhadap hasil sebuah laporan keuangan. Dilihat dari penelitian terdahulu Ade Rasinta (2017) pada penelitiannya akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori penjelasan tentang akuntabilitas maka hipotesis yang di ajukan adalah

H₁ : Penerapan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.10.2 Pengaruh Penerapan Transparasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Transparasi adalah wadah pemberian informasi yang jujur dan transparan terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan dari masyarakat yang memiliki hak untuk dapat mengetahui secara terbuka dan keseluruhan atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimana sudah dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatan pemerintah dalam melaksanakan amanah tersebut terhadap peraturan perundang-undangan. Transparasi juga suatu kebijakan yang memberikan informasi tentang keuangan yang bersifat transparan dan jujur yang dimana informasi tersebut akan disajikan kepada masyarakat, yang mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi secara terbuka dan menyeluruh untuk sebuah pertanggungjawaban pemerintah atas informasi yang dihasilkan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah (Meriansa, 2017)

Transparasi yaitu merupakan keterbukaan suatu pemerintah dalam menentukan kebijakan keuangan daerah, dengan adanya itu dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Pemerintah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif kepada kepentingan masyarakat yang dimana itu semua akan diciptakan oleh kebijakan transparasi. Maka dari itu transparasi dapat dikatakan salah satu kebijakan yang memiliki peran penting dalam proses penyajian laporan keuangan dan juga diperkirakan dapat meningkatkan suatu kualitas dalam proses laporan keuangan. (Septiningtyas, 2018).

Dilihat dari penjelasan teori dan beberapa pengertian transparasi maka dapat dilihat bahwa transparasi memiliki pengaruh yang penting terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Rasinta pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa 4 prinsip yang ada dalam *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan salah satu dari 4 prinsip tersebut transparasi termasuk didalamnya. Maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah

H₂ : Penerapan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.10.3 Hubungan Penerapan Responsibilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Responsibilitas merupakan salah satu hal terpenting yang memiliki hubungan dengan perintah, janji, dan status dengan percaya kepada pemerintah. Responsibilitas adalah dalam pelaksanaan organisasi publik apakah dilakukan dengan menggunakan prinsip administrasi yang sesuai dan benar dengan ketentuan dari organisasi tersebut. Maka responsibilitas ialah suatu tanggungjawab birokrasi public dalam melakukan tugas untuk melayani yang dibutuhkan oleh publik. (Rahadian & Rusantono, 2019)

Responsibilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. dalam pengertian responsibilitas yang dijelaskan menurut kamus administrasi diaman responsibilitas merupakan keharusan seorang yang melaksanakan kewajibannya sudah benar dengan dijalankan secara layak sesuai dengan peraturannya yang telah diberikan tanggungjawab terhadap tugas tersebut. Bukan hanya itu responsibiliti juga mengandung makna bahwasannya seseorang harus memiliki kebebasan dalam melakukan suatu tugas yang diberikan untuknya, tetapi mereka juga tidak dapat menyalah gunakan kebebasan itu dari hasil maupun akbita yang dilakukannya. Jika mereka melakukan suatu tindakan kecurangan maka dia dapat dituntut secara hukum yang berlaku. (Aprili, 2020).

Dilihat dari penjelasan teori dan beberapa pengertian responsibilitas maka dapat dilihat bahwa Responsibilitas memiliki pengaruh yang penting terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Rasinta (2017) yang menyatakan bahwa 4 prinsip yang ada didalam *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan salah satu dari 4 prinsip tersebut responsibilitas termasuk didalamnya. Maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah

H₃ : Penerapan Responsibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.10.4 Hubungan Penerapan Independensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Independensi merupakan karakter yang bebas dari sebuah pengaruh, tidak dapat dikendalikan, tidak bergantung kepada pihak manapun. Independensi juga dapat diartikan sebagai kejujuran dari dalam diri untuk dapat mempertimbangkan sebuah keputusan dan tidak memihak kepada siapapun. Sikap mental yang harus dimiliki yaitu *Independence in fact* dan *independence in appearance* (Shintya dkk., 2016).

Definisi independensi menurut Standar Profesional Akuntan Publik yaitu akuntan publik tidak dapat dipengaruhi, tidak berpihak, berkewajiban untuk jujur dalam mengambil keputusan. Dapat dilihat dari kata independen yang memiliki arti tidak mudah dipengaruhi atau bisa disebut netral karena independen itu merupakan orang yang akan melaksanakan tugasnya untuk kepentingan umum seperti auditor.

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa independensi memiliki pengaruh terhadap hasil dari laporan keuangan karena staf yang akan menyusun laporan keuangan harus memiliki dan menuruti kebijakan yang telah ditetapkan dalam independensi. Dalam penelitian Hayyuni Tyas Rosdiani (2011) menyatakan bahwa variabel independensi menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan maka hipotesis yang kami ajukan adalah H_4 : Penerapan Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

